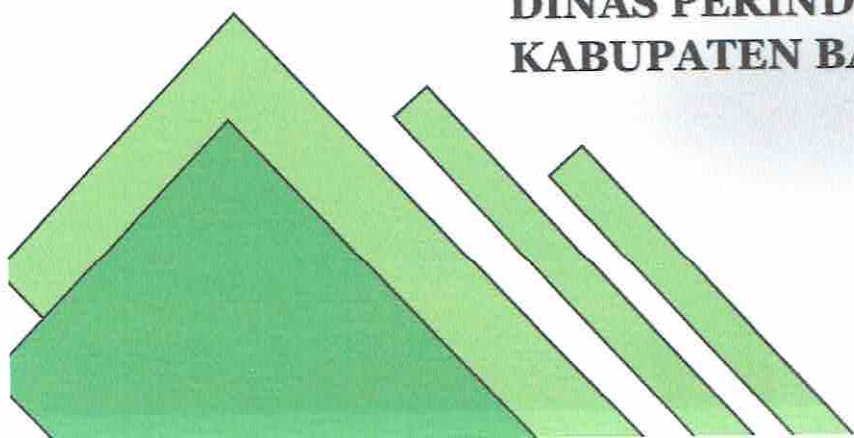




RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 050.24/ 113 /SK/DISPERINDAG-BLG/2025

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Juli 2025

Plt. Kepala Dinas,



HERLINA, S.Sos, MM
Pembina – (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050.24/ /SK/DISPERINDAG-BLG/2025

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat diselesaikan dan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Nomor: 050.24/ /SK/DISPERINDAG-BLG/2024 pada tanggal Juli 2025.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standarisasi dan perlindungan konsumen serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan renja ini agar dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2026.

Harapannya, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Balangan.

Paringin, Juli 2026
Plt. Kepala Dinas,

HERLINA, S. Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..	30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.....	52
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	58
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	74
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	74
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..	79
3.3 Program dan Kegiatan	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.....	91
4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan	91
4.2 Analisa Sosial Ekonomi.....	91
4.3 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan ..	95
BAB V PENUTUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Balangan.....	6
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Prdagangan Perdagangan Tahun 2024.....	22
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.....	32
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Balangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	59
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan	81
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2026 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Balangan untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Renja ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2026 dengan fokus utama Meningkatnya PAD Sektor Perdagangan dan Pendapatan IKM Pengolahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja), dimana Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja ini sangat penting bagi SKPD sebagai dasar untuk penyusunan anggaran dan kegiatan pada tahun 2026 nantinya, yang mana proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya

sinkronisasi antara rencana Program/Kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renja tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini merujuk pada:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun anggaran 2026 adalah sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun anggaran 2026, dimana di dalamnya memuat evaluasi dari target Renstra di tahun 2026 serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Renja ini bersama Renja SKPD lingkup Kabupaten

Balangan yang lain menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun anggaran 2026.

Secara umum tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan program serta terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas dalam hal perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan
- 4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 secara keseluruhan telah melaksanakan 10 Program, 21 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, dimana dari program tersebut terdapat 9 program prioritas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang termasuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja dari keberhasilan/kegagalan program tersebut.

Secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja untuk masing-masing program tersebut. Pada tabel 2.1 disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai triwulan I dengan tahun 2025.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Balangan

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	3	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJASTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJASTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENJASTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJASTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJASTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI TARGET RENJASTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	82.20	72.15	78.20	72.15	92.26	80.40	72.15	89.74
			PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
			NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	95.50	88.37	88.30	90.80	102.83	90.00	90.8	100.89
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	7	2	2	100.00	11	9	81.82
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	32	17	5	5	100.00	27	22	81.48
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4	0	0	0	0.00	2	-	0.00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJANA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TAHUN (N-2) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJANA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJANA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJANA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN TARGET REALISASI RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3178	1520	437	437	100.00	2.506	1.957	78.09
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	84	48	12	12	100.00	72	60	83.33
3.31.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	9	60	62	103.33	98	71	72.45
3.31.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	35	20	18	16	100.00	43	38	88.37
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	0	1	1	100.00	2	1	50.00
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	14	8	2	2	100.00	12	10	83.33
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	21	10	3	3	100.00	16	13	81.25
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat Penyelenggaraan rapat	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TAHUN (N-2) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
		koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)								
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	18	0	13	7	53.85	7	7	100.00
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	51	9	0	0	0.00	23	9	39.13
3.31.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	38	50	50	100.00	55	50	90.91
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	170	92	92	100.00	97	92	94.85
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	1	1	1	100.00	3	2	66.67

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.09.0011	Gedung Kantor atau bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	2	2	2	100.00	4	4	100.00
3.30.03	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	30.00	20.00	10.00	2.05	20.45	32	22.05	68.79
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitilisasi (%)	100	70	83.33	80.00	96.00	91.67	80.00	87.27
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	27	13	7	8	114.29	4	21	525.00
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	12	5	10	10	100.00	11	10	90.91
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	100	63.36	70.00	69.31	99.02	80.00	69.31	86.64
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	2	1	1	100.00	4	3	75.00
3.30.03.2.02.0002	Pembudayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	2	1	1	100.00	4	3	75.00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	100	10.00	50.00	0	0.00	70.00	10.00	14.29

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)	100	0.00	33.33	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	15	0	5	3	60.00	10	3	30.00
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang (Pelaku Usaha)	15	10	15	15	100.00	15	15	100.00
3.30.05.2.01.0006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	15	0	4	3		5	3	60.00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina (Pelaku Usaha)	3	1			0.00	3	1	33.33
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	25	0	7.88	52.77	669.61	21.74	52.77	242.71
		Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	2,100,000,000	706,972,000	1,380,000,000	1,080,007,200	78.26	1,680,000,000	1,080,007,200	64.29
30.07.2.01.0002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)	45.45	58.33	33.33	47.37	142.12	37.50	47.37	126.32
30.07.2.01.0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	10	19			0.00	10	19	190.00
		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dokumen)	1	1			0.00	1	1	100.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7+9)	11 = (10/4)
30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negari di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negari di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	35	0			0.00	28	0	0.00
30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negari di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20	0	20	20	100.00	20	20	100.00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	20	16.80	17.85	23.63	132.37	18,42	23.63	0.00
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	0	100	100	100.00	100	100	100.00
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	90	0	50	9	18.00	70	9	12.86
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui	4	1	1	1	100.00	3	2	66.67

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)	
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)									
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	7	1	3	3	100.00	5	3		60.00
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	7	1	3	3	100.00	5	3		
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	13	6	9	0	0.00	11	6		54.55
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	13	6	9	0	0.00	11	6		54.55
3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri (Buah)	1	0			0.00	0	0		0.00
3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	1	0			0.00	0	0		0.00
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Buah)	7	0			0.00	0	0		0.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TAHUN (N-2) TH 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	7	0			0.00	0	0	0.00
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	9	0	3	1	33.33	3	1	33.33
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P- B2) (Laporan)	9	0	3	1	33.33	3	1	33.33
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	3	0	1	0	0.00	1	0	0.00
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3	0	1	0	0.00	1	0	0.00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA	6.80	7.51	7.40	6.52	88.11	7.00	6.52	93.14

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENGJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7+9)	11 = (10/4)
		BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)								
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	410	190	66	67	101.52	330	257	77.86
		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	182	91	65	68	104.62	191	159	83.25
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	0	12	12	100.00	12	12	100.00
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	84	48			0.00	60	48	80.00
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	84.61	61.11	69.23	60.98	88.08	76.92	60.98	0.00
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	33.33	20.69	25	21.95	87.80	29.16	21.95	0.00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis (Orang)	14	9	1	2	200.00	13	11	84.62

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERJALAN TAHUN N-1) TAHUN 2023 10 = (5 + 7+9)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 11 = (10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah (Buah)	1500	1034	1300	1268	97.54	1.400	1268	90.57
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	170	98	150	175	116.67	160	175	109.38
3.30.06.2.01.0001		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan di tera ulang (Unit)	1500	1034	1300	1268	97.54	1.400	1268	90.57
3.30.06.2.01.0002		Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	350	201	50	44	88.00	295	245	83.05
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	15	12.39	13	13.16	101.26	14.00	13.16	0.00
3.31.02.2.01	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	0	5	2	40.00	5	2	40.00
		Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	375	300	325	325	100.00	350	325	92.86
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3	0	0	0	0.00	1	-	0.00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.33

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRAT PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRAT PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRAT (%)
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSentase PERTUMBUHAN IKM (%)	2.18	1.98	1.98	1.98	100.13	2.11	1.98	0.00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	160	46	82	131	159.76	120	131	109.17
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemeriksaan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS (Dokumen)	4	4	0	0	0.00	4	4	100.00
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3	0	0	0	0.00	1	-	0.00

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENGKA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENGKA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENGKA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	REALISASI RENGKA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023 10 = (5 +7+9)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENGKA TAHUN (%) 11 = (10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	7	4	1	1	100.00	6	5	83.32
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)	3.58	0.58	1.58	1.58	99.97	2.58	1.58	0.00
3.31.04.2.01	Penyediaan informasi industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPK Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM (Rupiah)	294.48	262.89	273.62	276.37	0.00	284.05	276.37	0.00
		Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	166	135	146	146	100.00	156	146	93.59
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	5	2	1	1	100.00	4	3	75.00

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakanlah program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada urusan pemerintahan perdagangan pada sektor pengembangan perdagangan yaitu dengan menyelenggarakan program peningkatan sarana distribusi perdagangan guna membantu meningkatkan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan seperti pasar yang ada di Kabupaten Balangan. Pada tahun 2024 jumlah pasar di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 11 buah. Tahun 2024 dilakukan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dengan reralisasi sebesar 2.05% atau sebesar 20.45% dari targetnya sebesar 10.00%. Jumlah pasar/fasilitas pendukung pasar yang direvitalisasi/dibangun sebesar 8 buah dengan capaian 114.29% dari target sebesar 7 buah.

Kemudian urusan pemerintahan perdagangan lainnya yaitu sektor Kemetrologian dan stabilisasi harga yaitu dengan menyelenggarakan program perizinan dan pendaftaran perusahaan antara lain fasilitasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan serta fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah toko/store yang ada mengalami kenaikan, pada tahun 2021 berjumlah 7 buah dan hingga diakhir tahun 2024 jumlahnya saat ada 10 buah. Tahun 2024 pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan berhasil direalisasikan

sebesar 23.63% dengan capaian sebesar 132.37% dari target sebesar 17.85%. Hal ini didorong oleh faktor:

1. Banyaknya pelaku yang mendaftarkan izin usahanya sesuai data yang terdapat pada aplikasi OSS-RBA, yaitu jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/ supermarket/ hypermarket,
2. Adanya program pembiayaan modal usaha tanpa bunga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Bank Kalsel Cabang Paringin serta BPR Kabupaten Balangan yang mensyaratkan legalitas izin usaha sebagai salah satu persyaratan.

Pada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu dengan menyelenggarakan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar. Tahun 2024 kemarin tercatat *Rata-rata KVpt* (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) adalah 6.52% dengan capaian 88.11% dari target sebesar 7,40%. Hal tersebut disebabkan oleh factor kegiatan monitoring harga dilakukan secara rutin di beberapa pasar di Kabupaten Balangan antara lain pasar modern paringin, pasar batumandi, pasar lampihong, pasar bihara awayan dan pasar halong (sewaktu waktu) guna mengetahui data harga bahan pokok dipasar secara real time sebagai early warning komoditi yang harganya bergejolak dalam mendukung kerja tim pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi pangan. Adapun kegiatan pemantauan dilakukan sebanyak 67 kali pemantauan dari target sebesar 66 kali pemantauan sedangkan jumlah pelaksanaan pasar murah direalisasikan sebesar 68 kali dengan capaian 104.62% dari target sebesar 65 kali.

Pada program standardisasi dan perlindungan konsumen dalam meningkatkan produk perdagangan yang aman di Kabupaten Balangan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengawasan metrology legal dan kegiatan tera/tera ulang dan dinyatakan sah untuk digunakan. Tahun 2024 pada kegiatan pengawasan metrologi legal direalisasikan sebesar 21.95% dengan capaian 87.80% dari target sebesar 25.00% sedangkan pada kegiatan metrologi legal dilaksanakan direalisasikan sebesar 60.98% dengan capaian 88.08% dari target sebesar 69.23%. Tahun 2024 terdata sebanyak 3.636 unit alat ukur takar timbang dan perlengkapannya

(UTTP), jumlah UTTP yang sudah ditera/tera ulang sebesar 1.268 unit dengan capaian 97.54% dari target sebesar 1.300 unit.

Di sektor industri selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2020-2024 rata-rata memberi kontribusi sebesar 1,53%. Padahal sektor Industri juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat mengganti peran sektor pertambangan dimasa mendatang. Dalam RPIK sendiri dibuat sasaran pembangunan industri salah satunya adalah peran sektor industri terhadap PDRB. tahun 2024 berada diangka sebesar 1,27% dari target 2.00%. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri antara lain disebabkan karena belum adanya pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia industri yang dimiliki terutama dalam penguasaan teknologi belum optimal dan belum tersedianya sarana dan prasarana industri (kawasan industri) yang dapat menarik minat investor dan belum tersedianya rumas kemasan. Berdasarkan data cakupan bina kelompok pengrajin hanya memperlihatkan tren yang stabil tanpa ada peningkatan yang signifikan. Namun realisasi dilapangan membuktikan bahwa para pengrajin tetap bertahan dan mengalami kenaikan omset pemesanan. Peningkatan tersebut karena meningkatnya minat dan ketertarikan masyarakat atas hasil karya dari para pengrajin, selain itu para pengrajin sendiri selalu optimis untuk terus mengaktifkan dan meningkatkan kreatifitas hasil usaha mereka berupa hasil hutan dan kerajinan seperti bambu, bamban, purun serta hasil hutan lainnya untuk dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomis. Begitu pula dengan jumlah usaha industri yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun hanya sebatas usaha kecil dan rumah tangga. Tahun 2024 jumlah IKM sebesar 2.469 IKM dengan pertumbuhan IKM di tahun 2024 yaitu sebesar 1,98%.

Dalam upaya meningkatkan sektor industri kecil menengah yaitu dengan menyelenggarakan program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Tahun 2024 IKM yang menerapkan teknologi industri direalisasikan sebesar 13.16% dengan capaian sebesar 101.26% dari target sebesar 13,00%. Hal tersebut disebabkan oleh faktor:

1. Tingginya antusiasme pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

2. Tersedianya anggaran untuk mendukung pemberian bantuan peralatan dan mesin produksi.

Sedangkan IKM yang Berkembang tahun 2024 sebesar 1.58% dengan capaian sebesar 100.00% dari target sebesar 1.58% Hal tersebut disebabkan oleh faktor:

1. Adanya kegiatan yang mendukung perkembangan industri seperti: sertifikasi produk dan publikasi produk melalui partisipasi dalam pameran atau expo.
2. Antusiasme pelaku usaha untuk memiliki sertifikat produk halal, sehingga produknya bisa masuk ke ritel modern.
3. Adanya edaran tentang penggunaan sasirangan hari jadi Kabupaten Balangan.

Untuk pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Dinas dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024

Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya Produktivitas Perdagangan						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(%)	(Miliar Rupiah)	(%)
1	Peningkatan Volume Perdagangan	831.350	867.760*	104.38	911.650	95.19

Keterangan :
 * : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023
 BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024.

Sasaran Strategis 2	
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(Nilai)	(Nilai)	(%)	(Nilai)	(%)
1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0549	0.1275	232.24	0.0578	220.59
Sasaran Strategis 3						
Meningkatnya Pendapatan IKM						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.68	1.70	101.19	2.94	57.82
Rata-rata Capaian				145.94		

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Produktivitas Perdagangan

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Produktivitas Perdagangan” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Capaian (%)
1	Peningkatan Volume Perdagangan	831.350	867.760*	104.38

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024

Indikator kinerja ini digunakan untuk menghitung peningkatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

Peningkatan Volume Perdagangan = $\frac{\text{Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)}}{\text{Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)}}$

Peningkatan
Volume
Perdagangan

= 867.760 Miliar Rupiah

Hasil capaian Peningkatan Volume Perdagangan adalah 867.760 Miliar Rupiah. Merupakan hasil dari Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) hasil perhitungan BPS tahun 2023.

Untuk memenuhi target indikator Peningkatan Volume Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Pasar

Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pasar Pemerintah, seperti revitalisasi pasar, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan meningkatkan aksesibilitas pasar. Hal ini dapat menarik lebih banyak pedagang dan konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan volume perdagangan.

2. Mempromosikan Penggunaan Sistem E-Commerce

Mempromosikan penggunaan platform e-commerce untuk mempermudah transaksi perdagangan, baik untuk pelaku usaha kecil maupun menengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menyelenggarakan promosi dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital.

3. Penyuluhan kepada Pelaku Usaha

Memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM tentang cara meningkatkan kualitas produk, manajemen bisnis dan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini bertujuan agar produk yang dipasarkan dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

4. Promosi dan Pameran Produk Daerah

Mengadakan kegiatan promosi, seperti pameran atau bazar, yang melibatkan produk lokal dari berbagai sektor, seperti hasil pertanian, kerajinan, dan produk industri lainnya. Promosi seperti ini dapat menarik pembeli dan meningkatkan volume perdagangan.

5. Pengembangan Jaringan Distribusi

Membangun dan memperluas jaringan distribusi untuk memudahkan akses produk-produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik secara regional maupun nasional. Hal ini mencakup peningkatan sistem logistik dan kerja sama dengan distributor serta pengecer.

6. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Mendorong kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan perusahaan atau sektor swasta lainnya untuk membuka peluang pasar baru dan meningkatkan penjualan produk daerah.

Kegiatan-kegiatan tersebut, yang berfokus pada peningkatan kualitas produk, akses pasar dan efisiensi distribusi, dapat mendukung tercapainya target indikator peningkatan volume perdagangan di Kabupaten Balangan pada tahun 2024.

Untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator peningkatan volume perdagangan pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat melakukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil:

1. Peningkatan Infrastruktur Pasar

Meningkatkan infrastruktur pasar dengan fasilitas yang lebih modern dan memadai, seperti sistem pembayaran digital dan area pemasaran yang lebih luas untuk pedagang.

2. Peningkatan Akses Pasar Melalui E-Commerce dan Digitalisasi

Terus mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan e-commerce dan platform digital, dengan memberikan pendampingan dan akses ke marketplace yang lebih luas.

3. Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah Lain

- a. Kemitraan Strategis: Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta, baik itu perusahaan besar, distributor, maupun pengecer, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar luar negeri.
- b. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah: Membina kerja sama dengan daerah lain untuk membangun jaringan distribusi yang

lebih luas dan memperkenalkan produk daerah Balangan ke pasar yang lebih besar.

4. Promosi dan Branding Produk Lokal

- a. Kampanye Promosi yang Lebih Masif, mengintensifkan promosi melalui berbagai saluran, baik online maupun offline, termasuk media sosial, pameran, dan bazar. Fokus pada kampanye branding yang menonjolkan keunggulan dan ciri khas produk lokal Balangan.
- b. Menentukan produk-produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar, lalu memfokuskan upaya pemasaran untuk menjangkau pasar nasional dan internasional.

5. Inovasi Produk

Riset dan Pengembangan dengan mengarahkan perhatian pada inovasi produk untuk meningkatkan daya saing, seperti mengembangkan produk turunan baru dari hasil pertanian atau kerajinan yang lebih bernilai tambah.

6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Pengawasan Terhadap Kualitas Produk, menjamin kualitas produk yang dijual di pasar dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap standar produk agar produk lokal tetap memiliki daya saing tinggi.

7. Evaluasi dan Penyesuaian Strategi

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil capaian yang telah dicapai untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang ada. Dari hasil evaluasi, melakukan penyesuaian strategi atau program agar dapat lebih responsif terhadap perkembangan pasar dan kebutuhan pelaku usaha.

Dengan upaya-upaya tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan diharapkan dapat menjaga dan bahkan meningkatkan volume perdagangan, mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah, serta membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing mereka kedepannya.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Perlindungan Konsumen” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0549	0.1275	232.24

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur peningkatan kegiatan perlindungan konsumen, Semakin tinggi pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah akan menunjukkan nilai baik bagi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan.

$$\text{Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan} = \frac{(A \text{ Tahun } n - A \text{ Tahun } n - 1) + \text{Nilai mutlak } (B \text{ Tahun } n - B \text{ Tahun } n - 1) + (C \text{ Tahun } n - C \text{ Tahun } n - 1)}{3}$$

Keterangan:

A = Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai Ketentuan

B = Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok

C = Persentase UTTP dan Perlengkapannya yang bertanda tera sah

$$\begin{aligned} \text{Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan} &= \frac{(23,63\% - 16,80\%) + (6,52\% - 7,51\%) + (34,87\% - 29.94\%)}{3} \\ &= 0.1275 \end{aligned}$$

Hasil capaian Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan adalah 0.1275. Merupakan hasil dari capaian realisasi tahun berjalan dikurang capaian realisasi tahun lalu atas indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah.

Untuk memenuhi target indikator Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan meningkatkan tertib perizinan sektor perdagangan berupa:
 - a. Sosialisasi perizinan berusaha sektor perdagangan

- b. Fasilitasi perizinan kepada pelaku usaha dengan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan.
2. Kegiatan meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berupa:
 - a. Melakukan pemantauan dan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ada dipasar sebanyak 67 kali pemantauan.
 - b. Melaksanakan operasi pasar sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dalam rangka pendendalian inflasi daerah.
3. Kegiatan meningkatkan tertib ukur dengan
 - a. Melaksanakan tera tera ulang terdapat 25 (dua puluh lima) tempat usaha utama yaitu:

Pasar	: 7 Pasar
SPBU	: 3 SPBU
Pertashop	: 9 Pertashop
Perusahaan	: 5 Perusahaan
Desa	: 1 Desa
 - b. Melaksanakan kegiatan pengawasan metrologi legal di 7 pasar dan 2 SPBU serta melaksanakan penyuluhan metrologi legal di 1 kecamatan.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis bagi aparatur pemerintahan desa sehingga pendataan/pemutakhiran data pelaku usaha yang perlu/wajib memiliki NIB dan belum memiliki NIB bisa tepat sasaran.
2. Meningkatkan kinerja tim pemantauan harga atau tim pengendali inflasi daerah dalam menyikapi gejolak harga yang terjadi secara nasional agar tidak memperburuk inflasi daerah.
3. Pendataan pelaku usaha perdagangan serta mengaktifkan laporan resi gudang untuk mendata jumlah penyimpanan bahan pokok sebagai alternatif karena belum adanya distributor besar/Gudang penyimpanan bahan pokok di Kabupaten Balangan.

4. Mengatur jadwal pemantauan harga barang dan jadwal kegiatan pasar murah agar efektif dan tidak saling berbenturan.
5. Perbaikan dan perluasan layanan tera atau tera ulang serta melaksanakan layanan terhadap pasar-pasar yang belum dijangkau ditahun sebelumnya.
6. Melaksanakan tera ulang di pasar batumandi dan pasar paringin sebanyak dua kali di satu pasar serta membuka layanan tera /tera ulang di kantor.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pendapatan IKM

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pendapatan IKM” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.68	1.70	101.19

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengidentifikasi jumlah IKM yang omzetnya meningkat.

$$\text{Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat} = \frac{\text{Jumlah IKM yang omzetnya meningkat di tahun N}}{\text{jumlah IKM di tahun N}} \times 100$$

$$\text{Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat} = \frac{42}{2.469} \times 100 = 1.70 \%$$

Hasil capaian Persentase IKM yang omzetnya meningkat adalah 1.70%. Merupakan hasil dari indentifikasi data IKM tahun 2024 yang omzetnya mengalami peningkatan dengan cara membandingkan jumlah produksi dikali nilai jual produk ditahun N terhadap jumlah produksi dikali nilai jual produk ditahun N-1, sehingga kenaikan atau penurunan omzet IKM dapat terlihat.

Untuk memenuhi target indikator Persentase IKM yang omzetnya meningkat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM.
2. Pemberian bantuan mesin dan peralatan bagi IKM.
3. Fasilitasi sertifikasi halal produk bagi IKM.
4. Fasilitasi pendaftaran merek produk bagi IkM.

5. Partisipasi dalam pameran atau expo untuk mempromosikan produk-produk bagi IKM.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Pengembangan kemampuan pelaku usaha industri sesuai kompetensi yang diperlukan.
2. Pendampingan terhadap pelaku usaha industri yang belum mahir menggunakan teknologi produksi.
3. Fasilitas berupa bantuan mesin dan peralatan bagi IKM mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) berbasis potensi sumber daya unggulan daerah.
4. Pengembangan sentra industri melalui sentra industri yang telah terbentuk secara alami.
5. Partisipasi dalam pameran atau expo serta menjalin kerja sama dengan instansi/pihak swasta terkait pengembangan produk IKM sesuai potensi pasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2024, telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui urusan pemerintahan perindustrian dan urusan pemerintahan perdagangan ada yang telah melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi meskipun target yang ditetapkan dalam renstra telah tercapai, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan untuk terus menjaga agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Balangan selalu mengalami kenaikan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dirasakan berdampak langsung bagi IKM melalui pemberian bantuan alat usaha, fasilitasi IKM mengikuti pelatihan teknis produksi, fasilitasi pembuatan sertifikat halal produk dan merk, yang efeknya diharapkan terjadi peningkatan penjualan yang semakin baik. Meningkatnya produk perdagangan yang aman, meningkatnya kualitas alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera serta meningkatnya tata kelola pasar dirasakan langsung juga oleh konsumen. Untuk lebih jelas terkait rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Balangan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Balangan

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			5.50	3.84	6.40	6.50	5.97	5.50	3.84	4.16	4.30	6.60	6.70			
Kontribusi PDRB Sektor Industri			1.90	1.29	1.99	2.00	1.98	1.90	1.29	1,26	1.27	2.01	2.02			
Peningkatan Volume Perdagangan (Miliar Rupiah)			671.41	751.05	791.2	831,350	640.39	671.41	751.05	867.76	935.08	982,267	1,031,381			
Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan			0.1440	0.0567	0.0480	0,0549		0.1440	0.0567	0.0799	0.1275	0.1925	0.2575			
Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat					1.18	1,68				1.18	1.70	2.31	2.94			
Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar (%)					0.45	22.05				0.45	22.05	27.05	32.05			
Cakupan promosi perdagangan dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan (%)												14.29	14.29			

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal (%)						7.88						52.77	55.55	4.88		
Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)			8.42	9.84	12.00	17.85	4.80	8.42	9.84	16.80	23.63	26.54	29.34			
Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan (%)						100.00					100	100	100			
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)			7.85	6.10	7.60	7.40	8.08	7.85	6.10	7.51	6.52	7.00	6.80			
Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)			61.53	69.23	61.53	69.23	46.15	61.53	69.23	61.11	60.98	76.92	70.00			

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi						Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)					20.83	25.00				20.69	21.95	29.16	25.00		
Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri (%)			6.81	10	12	13.00	4.10	6.81	10	12.39	13.16	14.00	14.55		
Persentase iKM yang tertib laporan (%)						12.00					12.00	15.00	17.00		
Persentase produk iKM yang dipromosikan (%)						66.67					66.67	66.67	66.67		

Untuk bidang saran dan pengembangan perdagangan tahun 2024 melakukan pembangunan/rehab/perbaikan pasar melalui program peningkatan sarana distribusi perdagangan, antara lain:

1. Revitalisasi Pasar Bihara berupa pengecoran lantai, los pasar dan perbaikan atap di beberapa titik.
2. Revitalisasi Pasar Modern Paringin dalam bentuk perbaikan lapak pasar iwak.
3. Revitalisasi drainase Pasar Batumandi.
4. Revitalisasi lantai pasar Awayan.
5. Revitalisasi pasar Uren berupa pembuatan drainase.
6. Pembuatan pagar beton pasar Modern Paringin.
7. Pemeliharaan dan pengecatan pasar Batumandi.
8. Pengecatan Pagar Pasar Halong

Seialin itu juga telah melaksanakan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui :

1. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan berupa:
 - a. Kegiatan pembersihan pasar modern adaro dan pasar paringin.
 - b. Pembersihan drainase di berbagai pasar yaitu pasar paringin, pasar modern adaro, pasar halong, dan pasar lampihong.
 - c. Penyemprotan rumput lingkungan pasar di lingkungan pasar yaitu pasar modern adaro, pasar batumandi, pasar galumbang, pasar halong, pasar tabuan, dan pasar uren
 - d. Pembelian peralatan UPS untuk CCTV pasar guna menjaga keamanan dan ketertiban di area pasar.
 - e. Penyelenggaraan pasar ramadhan.
2. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan berupa kegiatan pembentukan tim koordinasi penataan pedagang di kabupaten balangan serta penataan pedagang sebanyak 2.227 pedagang yang sudah diakukan penataan yaitu di pasar uren, pasar modern paringin, pasar paringin, pasar halong, pasar awayan, pasar lampihong dan pasar batumandi.
3. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan berupa sosialisasi/himbauan/memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan dan manajemen pasar, mengembangkan

potensi dan kualitas pasar dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pasar

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung pasar, mengingat pasar merupakan sentra perdagangan yang ada di Kabupaten Balangan.

Dalam hal pembinaan pelaku usaha perdagangan melalui:

1. Program pengembangan ekspor, antara lain:
 - a. Fasilitasi pelaku usaha UMKM dalam pameran dagang dalam event balangan expo sebanyak 16 (enam belas) UMKM sebagai berikut:

**Daftar pelaku usaha UMKM yang di fasilitasi dalam Pameran
Dagang**

No	Nama	Nama Pelaku Usaha	Alamat
1.	Karlina	UMKM Tiga Binian	Desa Mantimin Kecamatan Batumandi
2.	Abdul Hadi	UMKM Damii Mandai Gundul	Desa Riwa Kecamatan Batumandi
3.	Nor Hikmah	UMKM AdhaMirza	Desa Riwa Kecamatan Batumandi
4.	Nor Ilmiya	UMKM Elrizqa	Desa Karuh Kecamatan Batumandi
5.	Ernawati	UMKM Bapper Cuyy	Desa Karuh Kecamatan Batumandi
6.	Rahimah	UMKM Cemilan Anshary	Desa Karuh Kecamatan Batumandi
7.	Muhammad Ridho	UMKM Dua Lengan	Desa Karuh Kecamatan Batumandi
8.	Maskur	UMKM Hanauku Cantik Manis	Desa Bihara Hilir Kecamatan Awayan
9.	Muhammad Sadik	UMKM Cemis	Desa Nungka Kecamatan Awayan
10.	Titin Wartini	UMKM Kelompok Bahenol	Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan

No	Nama	Nama Pelaku Usaha	Alamat
11.	Siti Nurjannatun Na'im	UMKM Keripik Pisang Bunda	Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin
12.	Isnawati Marfuah	UMKM Sirasa	Desa Papuyuan Kecamatan Lampihong
13.	Zulfianor Fiqri	IKM Pengrajin Sasirangan AHS	Desa Lampihong Kiri Kecamatan Lampihong
14.	Laila Hayati	IKM Pengrajin Sasirangan Aneka Karya Sasirangan	Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong
15.	Risna Amalia	IKM Pengrajin Anyaman Purun Karya Anyam	Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong
16	Hety Karmila	IKM Pengrajin Anyaman Tirik Pabelum	Desa Mamigang Kecamatan Halong

- b. Pembinaan calon pelaku usaha ekspor sebanyak 3 (tiga) UMKM sebagai berikut:

Daftar Calon Pelaku Usaha Ekspor yang dibina

No	Pelaku Usaha	Alamat
1	Maskur	Desa Bihara Hilir Kecamatan Awaysan
2	Risna Amalia	Desa teluk Karya Kecamatan Lampihong
3	Hety Karmila	Desa Mamigang Kecamatan Halong

2. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri berupa fasilitasi UMKM dalam melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi kepada 20 (dua puluh) UMKM sebagai berikut:

Daftar UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan, perhorelan dan jasa akomodasi

No	Pelaku Usaha	Alamat
1	Suyati	RT. 03 UPT Pupuyuan Kec. Lampihong
2	Sutini	RT. 06 UPT Matang Hanau Kec. Lampihong
3	Iswati Marfu'ah	UPT Matang Hanau kelmatang hanau kec. lampihong

No	Pelaku Usaha	Alamat
4	Abdul Hadi	Desa Riwa Kec. Batumandi
5	Nur Hikmah	Desa Riwa no.34 Kec. Batumandi
6	Karlina	Rt. 01 Desa Mantimin Kec. Batumandi
7	Nor Ilmiya	Desa Karuh RT.03 Kec. Batumandi
8	Ernawati	Desa Karuh Kec. Batumandi
9	Muhammad Ridno	Desa Karuh No 65 Kec. Batumandi
10	Rahimah	Rt. 03 Desa Karuh Kec. Batumandi
11	Hj. Rinawati	Desa Bihara Hilir Kec. Awayan
12	Muhammad Sadik	Rt. 01 Desa Nungka Kec. Awayan
13	Maskur	Rt. 01 Desa Bihara Hilir Kec. Awayan
14	Saripah Suharda	Haur Batu Kec. Paringin
15	Siti Nurjannatun Na'im	Desa Lasung Batu Kec. Paringin
16	Nurul Fadhilah	Paringin Kota
17	Titin Wartini	Paringin Timur
18	Petis Acil Hadar	Paringin Kota
19	Lilis Iri Darmayanti	Desa Mungkur Uyam Rt 004
20	Norasiah	Desa Buntu Karau Rt 2 Kec. Juai

Untuk bidang kemetrollogian dan stabilisasi tahun 2024 telah melaksanakan pertama, kegiatan pendataan harga bahan pokok dan barang penting sebanyak 67 kali di 3 (tiga) pasar, yaitu Pasar Modern Paringin, Pasar Batumandi, Pasar Bihara sewaktu waktu guna mengukur tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Dalam rangka penanganan inflasi di daerah telah dilaksanakan kegiatan menggelar pasar murah sebanyak 68 kali, yang terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan pasar sebagai berikut:

1. Pasar Murah Reguler

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
1	23 januari 2024	Galumbang	Paringin Selatan
2	29 januari 2024	Simpang Tiga	Lampihong
3	30 januari 2024	Halubau	Paringin Selatan

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
4	7 Februari 2024	Mamigang	Halong
5	20 Februari 2024	Hamarung	Juai
6	22 Februari 2024	Ju'uh	Tebing Tinggi
7	23 Februari 2024	Halaman Kecamatan Paringin	Paringin
8	07 Maret 2024	Baruh penyambaran	Halong
9	20 Maret 2024	Halaman Kecamatan Paringin Selatan	Paringin Selatan
10	22 Maret 2024	Paringin Timur	Paringin
11	25 Maret 2024	Karuh	Batumandi
12	28 Maret 2024	Tundi	Awayan
13	01 April 2024	Sumber Rejeki	Juai
14	04 April 2024	Mampari	Batumandi
15	25 April 2024	Tugu Maritam	Paringin Selatan
16	02 Mei 2024	Sungai Batung	Juai
17	08 Mei 2024	Lok Hamawang	Lampihong
18	15 Mei 2024	Auh	Tebing Tinggi
19	16 Mei 2024	Kapul	Halong
20	22 Mei 2024	Baru	Awayan
21	29 Mei 2024	Majelis Guru di Bungin	Paringin Selatan
22	06 Juni 2024	Kupang	Lampihong
23	11 Juni 2024	Paran	Paringin
24	12 Juni 2024	Halaman Kantor Kecamatan Awayan	Awayan
25	20 Juni 2024	Hamparaya	Batumandi
26	25 Juni 2024	Halaman Polres Balangan	Paringin Selatan
27	26 Juni 2024	Binuang Santang	Halong
28	03 Juli 2024	Teluk Bayur	Juai

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
29	04 Juli 2024	Paringin Kota	Paringin
30	11 Juli 2024	Kusambi Hilir	Lampihong
31	17 Juli 2024	Buntu Pilanduk	Halong
32	18 Juli 2024	Gulinggang	Juai
33	23 Juli 2024	Taluk Karya	Lampihong
34	25 Juli 2024	Ajung	Tebing Tinggi
35	30 Juli 2024	Awayan Hilir	Awayan
36	01 Agustus 2024	Batu Piring	Paringin Selatan
37	06 Agustus 2024	Bata	Juai
38	08 Agustus 2024	Padang Raya	Halong
39	13 Agustus 2024	Tariwin	Batumandi
40	15 Agustus 2024	Murung Ilung	Paringin
41	20 Agustus 2024	Pulantan	Awayan
42	22 Agustus 2024	Tanah Habang Kiri	Lampihong
43	27 Agustus 2024	Dayak Pitap	Tebing Tinggi
44	29 Agustus 2024	Kelurahan Paringin Timur	Paringin
45	03 September 2024	Binjai Punggal	Halong
46	05 September 2024	Bungur	Batumandi
47	10 September 2024	Hukai	Juai
48	14 September 2024	Riwa	Batumandi
49	01 Oktober 2024	Kambiyain	Tebing Tinggi
50	02 Oktober 2024	Sungai Pumpung	Awayan
51	07 Oktober 2024	Gunung Riut	Halong
52	09 Oktober 2024	Sikontan	Awayan
53	15 Oktober 2024	Lalayau	Juai

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
54	17 Oktober 2024	Lok Panginangan	Lampihong
55	22 Oktober 2024	Aniungan	Halong
56	23 Oktober 2024	Paringin Timur	Paringin
57	24 Oktober 2024	Simpang Nadong	Tebing Tinggi
58	29 Oktober 2024	Gunung Manau	Batumandi
59	31 Oktober 2024	Pamurus	Juai
60	05 November 2024	Timbun Tulang	Batumandi
61	06 November 2024	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	Tebing Tinggi
62	12 November 2024	Tarangan	Paringin Selatan
63	14 November 2024	Kedondong	Awayan
64	18 November 2024	Marias	Juai
65	19 November 2024	Pimping	Lampihong
66	25 November 2024	Tabuan	Halong
67	28 November 2024	Banua Hanyar	Batumandi
68	02 Desember 2024	Lok Batung	Paringin

2. Pasar Murah Khusus (HKBN)

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
1	20 Maret 2024	Halaman Kecamatan Paringin Selatan	Paringin Selatan
2	11 Juni 2024	Paran	Paringin
3	25 November 2024	Tabuan	Halong

Kedua, kegiatan tera ulang telah dilaksanakan sebagai berikut :

No	Jenis UTTP	Jumlah UTTP
1	Uttp Pasar	1,178
2	Pompa Ukur Bbm SPBU	31
3	Timbangan Jembatan	3
4	Layanan Tera Kantor	6
5	Pompa Ukur BBM Pertashop	9
6	Layanan Tera Keliling Desa	41

7	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	-
TOTAL		1,268

Tera ulang juga dilaksanakan di 8 (delapan) pasar sebagai berikut:

No	Nama Pasar	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah UTTP Pasar
1	Pasar Sirap Juai	6 Maret 2024	44
2	Pasar Paringin Senin	4 November 2024	216
3	Pasar Modern Adaro	6 November 2024	187
4	Pasar Batumandi	12 November 2024	172
5	Pasar Halong	16 November 2024	201
6	Pasar Lampihong	17 November 2024	158
7	Pasar Bihara	22 November 2024	102
8	Pasar Paringin Senin II	2 December 2024	98
TOTAL			1,178

Untuk bidang perindustrian tahun 2024 telah melakukan pendataan terhadap industri kecil dan menengah pada beberapa kecamatan. Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 2.469 IKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melalui bidang perindustrian juga melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pendaftaran Merek/HKI kepada 15 (lima belas) IKM yang ada di Kabupaten Balangan sebagai berikut:

Daftar IKM Fasilitasi Pendaftaran Merek/HKI Tahun 2024

No	Nama Penanggung Jawab	Nama IKM	Merek	Alamat
1	Sapnawati	FilaFilo	FilaFilo	Gang Arrahman No.76 RT.004 Desa Bungin Kec.Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
2	Nurul Fadhillah	HANOOR	HANOOR	Paringin Kota No.38 RT.002 Kel.Paringin Kota Kec.Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

No	Nama Penanggung Jawab	Nama IKM	Merek	Alamat
3	Siti Kamariah	HAYARA	HAYARA	Kelurahan Batu Piring Komp. Maritam, Kec. Paringin Selatan, Kab. Balangan
4	Hety Karmila	Anyaman Tirik Pambelum	GoAnyam	Mamigang No.10 RT.003 Desa Mamigang Kec.Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
5	Rusmawati	Aneka Manisan Mafis	Alua Pepaya	Baruh Bahinu Luar RT.002 RW.001 Desa Baruh Bahinu Luar Kec.Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
6	Nujaimah	Mama Rinrin	N2R Kitchen	Simpang Tiga RT.003 Desa Simpang Tiga. Kec.Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
7	Ety Maryati	Snack Fadhilah	Sijalak	Jl. Lingkar Timur Blok.8 N0.16 RT.009 Kel.Paringin Timur Kab.Balangan Kec, Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
8	Suyati	Ulam Sari	SI KHENES	UPT Papuyuan RT.03 Desa Papuyuan Kec. Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

No	Nama Penanggung Jawab	Nama IKM	Merek	Alamat
9	Titin Wartini	Rorompok	cijaka	Batumandi RT.006 Desa Batumandi Kec. Batumandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
10	Siti Rohanah	LKP sahabat	Siin_raa Sasirangan	Paringin Kota No.04 RT,002 Kel.Paringin Kota Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
11	Saripah Suharda	Mama Difa	3D Dinda Difa Dafi	Perum.Cahaya Muhibbin RT.012 RW.005 Kelurahan Paringin Kota, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
12	Masramia	Tiga Badangsanak	Tiga Badangsanak	Jl.A. Yani Gang H. Sutardi RT.004 RW/002, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
13	Ima Nor'aini	Qeisa Fadila	Qeisa Fadila	Panaitan RT.003 Desa Panaitan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
14	Siti Komala Sari	Kitchen Duo AL	2aL	Desa Pupuyuan RT.003 Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

2. Kegiatan Pelatihan kepada para IKM sebagai berikut:

Daftar Pelatihan IKM Tahun 2024

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Wirausaha Baru (Kue)	15 Orang
2	Pelatihan Wira Usaha Baru (Kreasi Anyaman)	8 Orang
3	Pelatihan Diversifikasi Kerajinan	8 Orang
4	Pelatihan Wirausaha Baru (Bordir)	20 Orang

3. Pemberikan bantuan berupa Alat/Mesin Produksi untuk meningkatkan Produksi dengan penggunaan teknologi tinggi kepada para IKM sebagai berikut:

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
1	Kelompok Tiga Bintang	Jl. A. Yani Paringin Timur Rt 01 Kecamatan Paringin	Vero	Depot Air Isi Ulang	1 Paket
2	Arbaniansyah	Bihara Hilir Rt 02, Kec. Awayan	Arbaniansyah	Peralatan Usaha (Kue)	1 Paket
3	Mahyudinoor	Sungai Pumpung No 22, Kec. Awayan	Mahyudinoor	Peralatan Usaha (Kue)	1 Paket
4	Khatimah	Sikontan No 97 Rt 03, Kec. Awayan	Khatimah	Peralatan Usaha (Kue)	1 Paket
5	Rusna Herawati	Teluk Karya Rt 01, Kec. Lampihong	Rusna Herawati	Peralatan Usaha (Kue)	1 Paket
6	Aulia	Sikontan Rt 04, Kec. Awayan	Aulia	Peralatan Usaha (Mesin Jahit)	1 Paket
7	Apdillah Sidiq	Sungai Pumpung Rt 03, Kec. Awayan	Apdillah Sidiq	Peralatan Usaha (Mesin Jahit)	1 Paket
8	Fahrul	Sungai Pumpung Rt 02, Kec. Awayan	Fahrul	Peralatan Usaha (Mesin Jahit)	1 Paket
9	Baliansyah	Jimamun Rt 03 (Tangalin), Kec. Awayan	Baliansyah	Peralatan Usaha (Mesin Jahit)	1 Paket
10	Suriansyah	Sungai Pumpung Rt 03, Kec. Awayan	Suriansyah	Peralatan Usaha (Mesin Jahit)	1 Paket

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
11	Harti	Gulinggang Rt 02, Kec. Juai	Harti	Peralatan Usaha (Mesin Jahit)	1 Paket
12	Saini	Pulantan Rt 01, Kec. Awayan	Saini	Peralatan Usaha (Gula Aren)	1 Paket
13	Ripindi	Tundakan Rt 02, Kec. Awayan	Ripindi	Peralatan Usaha (Gula Aren)	1 Paket
14	Kelompok Garda Halong	Baruh Panyambaran Rt 02, Kecamatan Halong	Budianor	Mesin Korter Dan Honning	1 Paket
15	Kelompok Basamaan	Panggung, Paringin Selatan	Hamdan	Peralatan Bengkel	1 Paket
16	Kelompok Barantai	Sungsum, Tebing Tinggi	Nurmansyah	Peralatan Bengkel	1 Paket
17	Kelompok Bengkel Kula	Sungai Awang, Lampihong	Muhammad Zakiudin	Peralatan Bengkel	1 Paket
18	Kelompok Bengkel Mercy	Lamida Bawah, Paringin	Ahmad Dzakirin	Peralatan Bengkel	1 Paket
19	Kelompok Muda Desa	Jimamun, Lampihong	Ahmad Yani	Peralatan Bengkel	1 Paket
20	Kelompok Jahit Jelujur	Kecamatan Awayan	Ria Dati	Mesin Jahit Industri	1 Paket
21	Kelompok Tunas Mandiri	Tundi, Awayan	Kasmilawati	Mesin Jahit Industri	1 Paket
22	Kelompok Pandang Rahayu	Lamida Bawah, Paringin	Khairiah	Mesin Jahit Industri	1 Paket
23	Kelompok Mekar Sari	Murung Abuin, Paringin Selatan	Putri Kurniasih	Mesin Jahit Industri	1 Paket
24	Kelompok Berkah Bersama	Kandang Jaya, Lampihong	Ahmad Fahrija, SE	Mesin Jahit Industri	1 Paket
25	Kelompok Tunas Jaya	Kecamatan Lampihong	Fahriani	Mesin Jahit Industri	1 Paket
26	Kelompok Jaya Anugrah	Paringin Kota, Paringin	Siti Riwayati	Mesin Jahit Industri	1 Paket
27	Kelompok Kreatif Rumah Desain	Tebing Tinggi, Gunung Batu	Rahmadani	Mesin Percetakan	1 Paket

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
28	Gardu Kita Production	Kelurahan Paringin Timur, Kec. Paringin	Sandi	Peralatan Studio Foto	1 Paket
29	Kelompok Mama Kembar	Galumbang, Paringin	Misbahul Jannah	Peralatan Pembuatan Aneka Donat Dan Roti	1 Paket
30	Mama Dimas	Jungkal, Lampihong	Siti Raihanah	Peralatan Pengolahan Telur Asin	1 Paket
31	Kelompok Usaha Maju Jaya	Sungsum, Tebing Tinggi	Lini	Peralatan Usaha (Kue)	1 Paket
32	Kelompok Usaha Kue Bersama	Desa Lamida Bawah Rt 01 Kec. Paringin	Linda Puspita Sari	Alat Pembuat Aneka Kue	1 Paket
33	Kelompok Rumah Kue	Desa Murung Abuin Rt 02 Kec. Paringin Selatan	Norbaiti	Alat Pembuat Aneka Kue	1 Paket
34	Kelompok Usaha Kerajinan Tas Anyaman Bina Karya	Tanah Habang Kanan, Kec. Lampihong	Diktiarni	Rehab Rumah Produksi Dan Peralatan Pengrajin Tas	1 Paket
35	Kelompok Usaha Cangdai Tiga Binian	Mantimin, Kec. Batumandi	Karlina	Rumah Produksi Cangdai Tiga Binian	1 Paket
36	Kelompok Industri Cangkal Membangun	Batu Piring, Kec. Paringin Selatan	Supian Sauri	Gudang dan Mesin Pencetak Paving	1 Paket
37	Kelompok Industri Folqah	Mantimin, Kec. Batumandi	Basuki Rahman	Gudang dan Mesin Pencetak Paving	1 Paket
38	Kelompok Usaha Industri Karya Seni	Tampang, Kec. Lampihong	M. Ilham	Rumah Produksi Dan Peralatan Pengrajin Tas	1 Paket
39	Kelompok Jahit Baimbai	Lampihong Selatan, Kec. Lampihong	Rahmat Hidayat	Mesin Jahit Industri	1 Paket
40	Kelompok Penjahit Parsel	Kelurahan Batu Piring, Kec.	Ardiani	Mesin Obras	1 Paket

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
		Paringin Selatan			
41	Kelompok Fesyen Sasirangan Sahabat	Kelurahan Paringin Kota, Kec. Paringin	Siti Rohanah	Mesin Obras	1 Paket
42	Kelompok Menjahit Desa Simpang Tiga	Desa Simpang Tiga, Kec. Lampihong	Raudah	Mesin Obras	1 Paket
43	Kelompok Usaha Sabar Tailor	Kelurahan Batu Piring, Kec. Paringin Selatan	Sabirin	Mesin Bordir	1 Paket
44	Kelompok Penjahit Zahra	Desa Hamarung, Kec. Juai	Syahdi	Mesin Bordir	1 Paket
45	Kelompok Penjahit Aprinawati	Desa Kandang Jaya, Kec. Lampihong	Aprinawati	Mesin Bordir	1 Paket
46	Kelompok Penjahit Mama Raihan	Kelurahan Paringin Timur, Kec. Paringin	Helda Yanti	Mesin Bordir	1 Paket
47	Kelompok Penggilingan Sambel Praktis	Desa Lamida Bawah, Kecamatan Paringin	Mahriani	Mesin Pengolahan Bumbu Dan Kelapa	1 Paket
48	Kelompok Dapur Mama Muda	Desa Simpang Tiga, Kec. Lampihong	Ali Hamrin	Mesin Pengolahan Bumbu Dan Kelapa	1 Paket
49	Kelompok Bengkel Las Karya Logam	Margo Mulyo Rt 06, Kecamatan Paringin Selatan	Setya Ismana	Alat Plasma Cutting	1 Paket
50	Kelompok Pulantan Makmur	Desa Pulantan, Kec Awayan	Mulyadi	Mesin Penggiling Tepung	1 Paket
51	Usaha Bagamat Alung	Desa Ajung, Kec. Tebing Tinggi	Along	Mesin Penggiling Tepung	1 Paket
52	Kelompok Usaha Pembuat Kue Dan Peras Santan	Desa Juai, Kecamatan Juai	Ahmad Fauzi	Mesin Pamarut Kelapa	1 Paket
53	Kelompok Usaha Pemuda Matang Lurus	Desa Matang Lurus, Kec. Lampihong	Aliansyah	Mesin Pamarut Kelapa	1 Paket

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
54	Usaha Parut Kelapa Dan Peras Santan Siti Latipah	Desa Tabuan, Kec. Halong	Siti Latipah	Mesin Pamarut Kelapa	1 Paket
55	Usaha Parut Kelapa Dan Peras Santan M. Nawawi	Lalayau, Kec. Juai	M. Nawawi	Mesin Pamarut Kelapa	1 Paket
56	Usaha Parut Kelapa Dan Peras Santan Luthfi	Buntu Karau, Kec. Juai	Luthfi	Mesin Pamarut Kelapa	1 Paket
57	Usaha Parut Kelapa Dan Peras Santan Supriyadi	Baruh Panyambaran, Kecamatan Halong	Supriyadi	Mesin Pamarut Kelapa	1 Paket
58	Kelompok Usaha Bersama Surung Bagamat	Desa Mungkur Uyam, Kec. Juai	Ahmad Faisal	Gudang Pencetakan Paving Desa Mungkur Uyam Dan Peralatan Mesin Pencetak Paving Desa Mungkur Uyam	1 Paket
59	Kelompok Usaha Sejahtera	Desa Kandang Jaya, Kec. Lampihong	Samani	Gudang Dan Mesin Pencetak Paving	1 Paket
60	Kelompok Usaha Bersama	Desa Lajar, Kec. Lampihong	Fendy Aulia Rahman	Gudang Dan Mesin Pencetak Paving	1 Paket
61	Kelompok Usaha Sinar Harapan	Desa Binjai Punggal, Kec. Halong	Ili Agustina	Depot Air Minum	1 Paket
62	Kelompok Wira Kerja	Kelurahan Batu Piring, Kec. Paringin Selatan	Surya Rahmat, S.Pd	Depot Air Minum	1 Paket
63	Kelompok Usaha Mikro Berkat Anak	Desa Halong Kecamatan Halong	Sunardi	Mesin Cacah Bambu	1 Paket
64	Kelompok Bengkel Usaha Bersama	Desa Muara Jaya Kecamatan Awayan	Agus Fahmi	Peralatan Bengkel Mobil	1 Paket

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
65	Mini Workshop & Wearhouse A2	Kelurahan Paringin Timur, Kec. Paringin	Ryan Alfianoor	Peralatan Las Alat Berat	1 Paket
66	Kelompok Usaha Azka Ramadhani	Kelurahan Batu Piring, Kec. Paringin Selatan	Akhmad Lazuardi	Mesin Digital Printing	1 Paket
67	Kelompok Usaha Biru Restorasi	Sungai Awang, Lampihong	Fathurrahman	Peralatan Bengkel Las	1 Paket
68	Kelompok Kancil Putri	Buntu Pilanduk, Halong	Yanah	Alat Pengering Jagung Type 2	1 Paket
69	Kelompok Tunas Harapan	Padang Raya, Halong	Sam'ani	Mesin Pengering Jagung Type 1 & Mesin Pembuat Pakan	1 Paket
70	Kelompok Usaha Produksi Sasirangan Kambang Lukut	Badalungga, Awaysan	Mis Erna Fauziah	Peralatan Usaha	1 Paket
71	Kelompok Perbengkelan Dan Deco Bina Muda Kreatif	Panaitan, Lampihong	Muhammad Ferdy Ramadani	Peralatan Cat Deco	1 Paket
72	Kelompok Usaha Keripik Mawar	Baruh Panyamabaran, Halong	Susiani	Alat Pembuatan Keripik	1 Paket
73	Kelompok Usaha Wanita Mandiri	Buntu Karau, Kec. Juai	Sukmawati	Peralatan Pembuatan Aneka Donat Dan Roti	1 Paket
74	Damar Setiyono	Baruh Bahinu Dalam Rt 02, Kec. Paringin Selatan	Damar Setiyono	Peralatan Usaha (Sablon)	1 Paket
75	Abdullah	Tanah Habang Kiri No 19 Rt 03, Kec. Lampihong	Abdullah	Peralatan Usaha (Hulu Parang)	1 Paket

No	Nama Industri	Alamat	Nama Penerima	Rincian	Jumlah
76	Asnawi	Batu Merah No 67 Rt 02, Kec. Lampihong	Asnawi	Peralatan Usaha (Bengkel)	1 Paket
77	Nurani	Batu Merah Rt 02, Kec. Lampihong	Nurani	Peralatan Usaha (Bengkel)	1 Paket
78	Abdul Rohim	Marias Rt 04, Kec. Juai	Abdul Rohim	Peralatan Usaha (Bengkel)	1 Paket
79	Juhriansyah	Piyait Rt 04, Kec. Awayan	Juhriansyah	Peralatan Usaha (Bengkel)	1 Paket
80	Supriadi	Bihara Hilir No 10 Rt 02, Kec. Awayan	Supriadi	Peralatan Usaha (Bengkel)	1 Paket
81	Bakran	Tundakan Rt 02, Kec. Awayan	Bakran	Peralatan Usaha (Pandai Besi)	1 Paket
82	Yacobus Made Ali	Murung Abuin, Paringin Selatan	Yacobus Made Ali	Peralatan Usaha (Bengkel)	1 Paket

Secara umum saat ini baik Industri Kecil dan Menengah (IKM) hingga tahun pertama perencanaan rencana kerja (Renja) SKPD dihadapkan pada rendahnya daya saing dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, akibatnya pengembangan produk, khususnya produk pangan masih rendah dan juga desain kemasan produk masih belum berorientasi pada pasar. Keterbatasan modal masih menjadi kendala utama bagi IKM yang ada di Kabupaten Balangan. Pada umumnya modal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan usaha produksi.

Pelaku usaha sendiri ditahun mendatang akan dihadapkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat cepat. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terus berupaya melakukan pembinaan dan pelatihan, fasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga kepada IKM. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha sebagai sarana memperluas jaringan pemasaran, misalnya untuk mengenalkan produk-produk yang dihasilkan. Melalui fasilitasi promosi dan pameran, pelaku usaha dan IKM secara tidak langsung diajak untuk melihat produk-produk

dari luar, tujuan utamanya adalah mengharapkan pelaku usaha bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan guna sebagai pengembangan produk yang dihasilkan saat ini, Keberpihakan pemerintah daerah dimulai dari dikeluarkannya surat edaran Bupati Balangan nomor: 518.3/104/DKUKMPP-BLG/2021 tentang Prioritas Pembelian/Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Pedagang (Pasar) Lokal di Kabupaten Balangan. Dengan tujuan agar belanja pemerintah daerah lebih mengutamakan menggunakan produk lokal yang ada di Kabupaten Balangan, usaha ini diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, sehingga produk yang dihasilkan/diproduksi oleh IKM mampu masuk pasar dalam negeri.

Selain itu juga pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menjalankan program "Belanja Cil" yang di ppori oleh Bapperida Kabupaten Balangan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Menambah peredaran dan perputaran uang di Kabupaten Balangan.
2. Menghidupkan pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Balangan.
3. Transaksi keuangan para pedagang dan pelaku usaha kecil menengah.
4. Meningkatkan daya beli dan daya jual Masyarakat.

Sebagai leading sektor penggampu urusan pemerintahan bidang perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta untuk mengawal keberlanjutan program tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi SKPD serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi pada tahun 2024 sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SKPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk mewujudkan perekonomian

masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi selama tahun 2024 antara lain:

1. Data pelaku usaha industri masih belum seluruhnya terintegrasi dengan website basis data milik kementerian perindustrian, dikarenakan kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai website basis data tersebut, keengganan pelaku usaha dalam memasukan data mereka dikarenakan terbatasnya waktu maupun kemampuan dalam mengakses website tersebut, kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai isi dari NIB (Nomor Induk Berusaha) tersebut sehingga setelah memiliki izin usaha elektronik yang berupa NIB pelaku usaha merasa izin tersebut sudah cukup untuk dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha.
2. Produk lokal yang bersaing hingga tingkat provinsi masih terbatas, dikarenakan belum memenuhi standar yang diharapkan oleh ritel modern baik dari kemasan, izin edar maupun sertifikasi produk. Keikutsertaan di event pameran atau expo sebagai media promosi sudah rutin dilakukan, namun belum memberikan dampak secara signifikan sehingga perlu adanya terobosan baru dalam mengenalkan potensi produk lokal.
3. Rendahnya sarana dan prasarana perdagangan yang ada dalam pemenuhan SNI 8152: 2015.
4. Infrastruktur pasar dalam menunjang kebersihan yang ada belum memadai.
5. Potensi ekspor yang ada di Kabupaten Balangan pada sektor hasil pertanian, perkebunan, perikanan, industri serta perdagangan belum terlihat.
6. Belum optimal jaringan pemasaran baik ditingkat lokal maupun nasional.
7. Belum optimalnya pembangunan kemitraan antara pelaku usaha/UMKM dengan pelaku jasa ritel modern dan markatplace.
8. Kenaikan harga barang yang cukup tinggi menjelang hari besar keagamaan (HBKN) disebabkan menurunnya jumlah pasokan dipasaran.

9. Pasar murah reguler yang digelar belum bisa merambah hingga ke semua desa yang ada di Kabupaten Balangan.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tera/tera ulang. Masyarakat masih merasa bahwa tera/tera ulang bukan suatu kewajiban dikarenakan aturan hukum mengenai kewajiban tera/tera ulang belum secara menyeluruh diketahui oleh seluruh masyarakat dan belum ada penegasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut.
11. Masih kurangnya jumlah peralatan standar kemetrollogian, khususnya Anak Timbangan bidur untuk pelayanan tera/tera ulang Timbangan Jembatan milik Perusahaan.
12. Unit Metrologi Legal (UML) Kabupaten Balangan tidak memiliki tenaga reparatir bersertifikasi. Dalam pelaksanaan tera/tera ulang, reparatir sangat diperlukan dalam penjustiran dan reparasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Untuk menciptakan tenaga reparatir, perlu mengikuti Pelatihan Reparasi yang diselenggarakan di luar Provinsi. Persyaratan peserta pelatihan reparasi yaitu THL/ Honorer Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota yang belum berpengalaman maupun yang sudah berpengalaman.

Adapun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga memudahkan dalam pengambilan data, perlu adanya koordinasi dengan instansi yang menangani perizinan usaha agar setiap ada pelaku usaha yang membuat izin usaha diarahkan untuk memenuhi kewajiban yang terdapat pada NIB.
2. Perlunya adanya pengembangan usaha melalui sertifikasi dan promosi produk. Dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha industri kecil agar produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta mampu bersaing dipasar global. Serta perlu pemetaan potensi suplai produk jadi maupun setengah jadi kepada Perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan berupa revitalisasi bangunan utama pasar dan pengadaan beberapa fasilitas

pendukung pasar lainnya serta pemberdayaan pengelola dan pedagang pasar dalam pemenuhan SNI 8152: 2015.

4. Pemeliharaan infrastruktur pasar dalam menunjang kebersihan pasar
5. Pengembangan ekspor tidak hanya bersifat promosi dagang saja tetapi menyentuh hingga perbaikan kualitas produk dan kualitas pelaku usahanya.
6. Peningkatan jaringan pemasaran melalui promosi pameran dagang ditingkat lokal maupun nasional.
7. Peningkatan kemiteran tidak hanya dengan ritel modern dan marketplace tetapi bisa merambah kemiteraan dengan perhorelan dan jasa akomodasi.
8. Melakukan monitoring terhadap kenaikan harga barang menjelang hari besar keagamaan (HBKN), menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak distributor untuk memastikan tidak terjadinya kelangkaan logistik serta menggelar operasi pasar khusus.
9. Menggelar kegiatan operasi pasar murah/reguler hingga merambah ke semua desa yang ada di Kabupaten Balangan.
10. Perlu dilaksanakan sidak Alat, Ukur, Takar, Timbang (UTTP) yang bekerjasama dengan stakeholder terkait khususnya aparat hukum. Selain itu frekuensi pelaksanaan sidak perlu ditambah agar masyarakat lebih melek akan adanya kewajiban tera/tera ulang.
11. Perlunya belanja modal untuk menambah jumlah peralatan standar kemetrolagian.
12. Perlunya Tenaga Honorer UML Kabupaten Balangan mengikuti Pelatihan Teknis Tenaga Reparatur yang diselenggarakan di luar Provinsi oleh Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan (BPMJP).

Dari uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, menyelenggarakan pelatihan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi, fasilitasi sertifikasi halal dan merek, fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan, revitalisasi sarana prasarana perdagangan, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar dan perlindungan konsumen menjadi fokus kami untuk dilaksanakan ditahun mendatang.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses informasi sehingga perlu pendampingan dan sebaran pelaku usaha industri tidak hanya berpusat pada pusat kota sehingga perlu alokasi waktu dan tenaga dalam pendampingan.
2. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha memanfaatkan peluang pasar, penguasaan teknologi dan kemampuan SDM dalam melakukan sertifikasi produk secara mandiri sehingga perlu pendampingan dan pembinaan.
3. Belum optimanya bangunan utama pasar dan pengadaan beberapa fasilitas pendukung pasar lainnya.
4. Tidak imbangnya jumlah fasilitas infrastruktur pasar yang menunjang kebersihan pasar dengan peningkatan limbah pasar yang dihasilkan.
5. Masih rendahnya jumlah negara tujuan ekspor serta masih rendahnya pelaku usaha ekspor baik dari segi keterampilan dan kualitas produk ekspor yang belum memenuhi syarat ekspor.
6. Belum optimalnya pelaku usaha dalam manajemen sistem rantai pasok dalam jaringan pemasaran dan kemitraan
7. Terus melakukan monitoring terhadap kenaikan harga barang menjelang hari besar keagamaan (HBKN), menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak distributor untuk memastikan tidak terjadinya kelangkaan logistik serta menggelar operasi pasar khusus.
8. Terus menggelar kegiatan operasi pasar murah/reguler yang merambah ke semua desa di Kabupaten Balangan demi meningkatkan pemerataan ekonomi dan dirasakan oleh semua masyarakat bukan hanya di daerah perkotaan.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tera/tera ulang.
10. Tidak memiliki tenaga reparatir yang bersertifikasi sehingga dalam pelaksanaan tera/tera ulang khususnya Sidang Tera Ulang, dalam hal reparasi dikerjakan secara otodidak oleh tenaga honorer.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing pelaku usaha industri untuk menghadapi persaingan ekonomi global.
2. Melakukan integrasi data dan informasi pelaku usaha industri melalui website kementerian perindustrian.
13. Sinkronisasi program peningkatan sarana distribusi perdagangan dalam hal penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan dalam pemenuhan SNI 8152: 2015.
3. Meningkatkan fasilitas pasar yang menunjang kebersihan pasar.
4. Meningkatkan jumlah negara tujuan ekspor dan peningkatan jumlah pelaku usaha ekspor melalui kegiatan penjangkaran.
5. Meningkatkan SDM pelaku usaha dalam manajemen sistem rantai pasok dalam jaringan pemasaran dan kemiteraan
6. Meningkatkan jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
7. Meningkatkan jumlah pelaksanaan operasi pasar murah baik sifatnya khusus ataupun reguler.
8. Melaksanakan sidak Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bekerjasama dengan stakeholder terkait khususnya aparat hukum agar Masyarakat melek betapa pentingnya tera/tera ulang untuk perlindungan konsumen dan melek hukum terkait tera/tera ulang guna menciptakan Masyarakat Melek Metrologi.
9. Penambahan ruang lingkup pelayanan Unit Metrologi Legal (UML) Kabupaten Balangan dengan penambahan peralatan standar kemetrologian.
10. Perlunya Tenaga Honorer Unit Metrologi Legal (UML) Kabupaten Balangan mengikuti Pelatihan Tenaga Reparatur yang diselenggarakan di luar Provinsi oleh Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan (BPMJP).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2025-2029 diharapkan dapat tercapai dengan baik, meskipun ada. Dalam dokumen ini memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program hasil review terhadap rancangan awal RKPD beserta indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing program yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Balangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	88.50	Nilai	8,935,890,050	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	88.50	Nilai	11,375,868,151	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (%)	100	%	75,821,400	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (%)	100	%	75,821,400	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	Dokumen	37,660,100	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	Dokumen	37,660,100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	5	Laporan	21,471,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	5	Laporan	21,471,300	
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	16,690,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	16,690,000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan	100	%	7,423,672,117	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan	100	%	8,086,042,026	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dilaporkan secara tepat waktu (%)						dilaporkan secara tepat waktu (%)				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	602	Orang/Bulan	7,423,672,117	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	546	Orang/ Bulan	7,964,842,026	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	12	Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	12	Dokumen	121,200,000	
III	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)	100	%	630,860,000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)	100	%	230,860,000	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	Paket	180,860,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	Paket	180,860,000	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	86	Orang	450,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	Orang	50,000,000	
IV	Administrasi Umum perangkat daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	%	243,659,650	Administrasi Umum perangkat daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	%	568,619,650	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	Paket	17,635,300	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	Paket	17,635,300	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	5	Paket	33,440,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	30	Paket	180,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kantor yang disediakan (Paket)				perlengkapan kantor		yang disediakan (Paket)				
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	59.319,250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	59.319,250	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	Paket	56.695,100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	Paket	56.695,100	
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	3	Dokumen	4,970,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	3	Dokumen	4,970,000	
13	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	Laporan	71,500,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	Laporan	250,000,000	
V	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)	100	%	-	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)	100	%	60,000,000	
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	Unit	-	
15	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	14	Unit	-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	2	Unit	60,000,000	
VI	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP (%)	100	%	266,754,954	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP (%)	100	%	2,069,303,146	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	143,418,954	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	143,418,954	
17	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	123,336,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1	Laporan	1,915,884,192	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (%)	100	%	295,221,929	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (%)	100	%	295,221,929	
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	Unit	227,373,804	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	60	Unit	227,373,804	
19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	97	Unit	33,848,125	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	105	Unit	33,848,125	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	Unit	34,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	Unit	34,000,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	18.42	%	98,305,071	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	29.34	%	48,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	%				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	%		
VIII	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	70	Buah	50,357,071	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	12	Buah	25,000,000	
21	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	Dokumen	50,357,071	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	Dokumen	25,000,000	
IX	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran	11	Buah	23,045,500	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	12	Buah	23,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	3	Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	5	6	7	8 untuk Penorima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	9	10 Dalam Negeri (Buah)	11	12	13	14
22	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Secara Elektronik (Dokumen)	11	Dokumen	23.045.500	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)	12	Dokumen	23.000.000	
X	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	1	Buah	24.902.500	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	0	Buah	-	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	Dokumen	24.902.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	0	Dokumen	-	
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	10.00	%	1,747,876,500	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	32.05	%	3,840,329,700	
XI	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	91.67	%	1,348,796,500	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	100	%	3,711,529,700	
24	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	Unit	823,200,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	Unit	3,303,200,000	
25	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	11	Unit	525,596,500	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	Unit	408,329,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perdagangan (Unit)										
XII	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	80.00	%	399,080,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	79.31	%	128,800,000	
26	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	351,470,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	102,950,000	
27	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	47,610,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	Dokumen	25,850,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	6.80	%	1,072,716,418	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	6.80	%	1,072,716,418	
XIII	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	81	Kali	1,072,716,418	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	75	Kali	1,072,716,418	
			Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	36	Kali				Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	65	Kali		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	Laporan	161,227,200	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	Laporan	161,227,200	
29	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	911,489,218	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	911,489,218	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN (%)	14.29	%	310,359,600	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN (%)	14.29	%	310,359,600	
XIV	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor (%)	70.00	%	310,359,600	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor (%)	40.00	%	310,359,600	
			Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	10	Orang				Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	5	Orang		
30	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	5	Pelaku Usaha	150,649,800	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk	5	Pelaku Usaha	150,649,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)						Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)				
31	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promos	5	Produk	159,709,800	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promos	1	Produk	159,709,800	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	70.00	%	274,277,699	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	70.00	%	1,034,277,699	
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	25.00	%				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	25.00	%		
XV	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang berlaku (%)	-	%	274,277,699	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang berlaku (%)	30.00	%	1,034,277,699	
			Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	-	Buah				Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	130	Buah		
32	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang (Unit)	1,250	Unit	147,521,900	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang (Unit)	1,300	Unit	612,521,900	
33	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal	50	Orang	126,755,799	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina (Orang)	225	Orang	421,755,799	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			yang dibina (Orang)										
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	21.74	%	1,694,365,700	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	4.88	%	1,701,505,700	
XVI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	2,100,000,000	Rupiah	1,694,365,700	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	1,762,000,000	Rupiah	1,701,505,700	
34	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	35	UMKM	1,594,365,700	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	30	UMKM	1,701,505,700	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	15.00	%	1,237,802,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	14.55	%	1,312,802,000	
XVII	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	IKM	1,237,802,000	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5	IKM	1,312,802,000	
			Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	375	IKM				Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	375	IKM		
			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)	0	%				Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)	38.13	%		
35	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	Dokumen	-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	Dokumen	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	Dokumen	295,995,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	Dokumen	295,995,000	
37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	Dokumen	941,807,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	Dokumen	941,807,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)	17.00	%	235,249,500	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)	17.00	%	178,181,000	
XVIII	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	120	IKM	235,249,500	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	160	IKM	178,181,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Dokumen	75,780,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Dokumen	75,780,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	159,489,500	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	102,401,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PERSENTASE PRODUK IKM YANG DI PROMOSIKAN (%)	66.67	%	243,149,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PERSENTASE PRODUK IKM YANG DI PROMOSIKAN (%)	66.67	%	1,166,350,100	
XIX	Penyediaan informasi industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Produk IKM yang dikurasi (Produk)	18	Produk	243,149,000	Penyediaan informasi industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Produk IKM yang dikurasi (Produk)	18	Produk	1,166,350,100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan renja ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan pihak legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang terkait dengan usulan yang bersumber dari sektor atau bidang Sosial Ekonomi biasanya meliputi usulan mengenai pemberdayaan masyarakat, perkuatan modal pembinaan pelaku usaha dan bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha.

Semua usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan usulan dari pokok pikiran (Pokir) pihak legislatif/ DPRD akan diverifikasi dan apabila sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dan atau apabila memungkinkan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dana yang ada akan diakomodir pada program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sebagai berikut:



Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Termuat dalam delapan agenda pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu sebagai berikut:

1. Transpormasi Sosial



2. Transpormasi Ekonomi



3. Transpormasi Tata Kelola.



4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia.



5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.



6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk penguatan pondasi transformasi.

Dalam upaya menyeleraskan dengan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Perindustrian mengambil peran penting dalam Implementasi Industri 4.0 Akselerasi visi Indonesia 2045. agar industri manufaktur semakin produktif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan industri manufaktur sebagai salah satu tahapan pembangunan nasional.

“Industri sebagai tulang punggung perekonomian karena membawa *multiplier effect* yang cukup besar. Di antaranya adalah peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja kerja lokal dan penerimaan devisa dari ekspor”. Seiring berjalannya era ekonomi digital saat ini, industri perlu memanfaatkan teknologi manufaktur terkini dalam upaya peningkatan produksinya. Selanjutnya aktif pula melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna menciptakan inovasi. Lima sektor yang diprioritaskan dalam implementasi Industri 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik serta kimia.

Sedangkan Kementerian Perdagangan mengambil peran penting dalam peningkatan perdagangan berjangka komoditi serta mendorong penguatan perdagangan dalam dan luar negeri. Fokusnya adalah peningkatan peran dalam rantai pasok komoditas serta ekosistem perdagangan di pasar lokal dan global, melalui penguatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) dapat mendukung peningkatan ekspor komoditas dan menjaga inflasi, di samping sebagai fasilitas pembentukan harga acuan komoditas strategis Indonesia.

Dalam rangka sinkronisasi program antara program nasional dengan program daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan renja tahun 2026 ini dengan memperhatikan pula prioritas dan program nasional, khususnya terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
2. Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor dan calon pelaku usaha ekspor.
3. Peningkatan perdagangan dari komoditi hasil pertanian.
4. Perkembangan megatrend global seperti persaingan sumber daya alam, teknologi, demografi, perdagangan internasional dan perubahan situasi geopolitik.
5. Perkembangan inflasi, resesi global, krisis pangan dan energi, serta perkembangan teknologi seperti AI dan metaverse.
6. Peningkatan kemampuan teknologi industri untuk mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat padat karya

dalam rangka peningkatan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

7. Penguatan pengawasan izin usaha industri.
8. Penguatan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD pada tahun 2026 adalah Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui pemenuhan SNI 8152:2021, Peningkatan tujuan ekspor, pembinaan calon pelaku usaha ekspor serta fasilitasi dalam pameran dagang nasional, Fasilitasi kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi, Memfasilitasi pelaku usaha dalam perizinan sektor perdagangan, Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang serta menggelar operasi pasar dalam penanganan inflasi daerah dan penurunan stunting, Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang serta peningkatan pengawasan metrologi legal dengan penguatan SDM pemeriksa, Peningkatan kapasitas produksi, teknik pengolahan produk dan diversifikasi produk IKM, Memfasilitasi IKM dalam legalitas usaha sektor industri, Memfasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan nilai tambah produk.

Peran sektor perdagangan dalam perekonomian nasional sangat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan (besar dan eceran) dalam pendapatan nasional. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dll. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya sektor perdagangan. Kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor-impor, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar rakyat, pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan UMKM dan petani di bidang perdagangan.

Dalam rangka pencapaian iklim usaha yang kondusif dan terkait dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha kedepan diharapkan mampu meningkatkan performa perdagangan dan investasi didalam negeri.

Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki. Sesuai dengan tupoksi serta peran serta Kementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing tersebut, perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan perkembangan dinamika pembangunan perdagangan. Selain itu Kementerian Perdagangan sebagai pembina sektor juga terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kinerja manajemen dalam kerangka reformasi birokrasi serta meningkatkan pelayanan peizinan diantaranya melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani secara online dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Renja Tahun 2026 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami tahun 2026 adalah Peningkatan kapasitas produksi, teknik pengolahan produk dan diversifikasi produk IKM, Memfasilitasi IKM dalam legalitas usaha sektor industri, Memfasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan nilai tambah produk.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tidaklah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yang mana tujuan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2025-2029, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2026 adalah Meningkatnya PAD Sektor Perdagangan dan Pendapatan IKM Pengolahan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah Sebagai Berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas Perdagangan
2. Kondusifitas Perdagangan
3. Meningkatnya Perlindungan Konsumen

4. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Industri

3.3 Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang jadi pertimbangan dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan ditahun 2026 adalah program-program yang menunjang capaian RPJMD yaitu Program perizinan dan pendaftaran perusahaan, Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program pengembangan ekspor, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program standardisasi dan perlindungan konsumen, Program perencanaan dan pembangunan industri, Program pengendalian izin usaha industri dan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Jika sampai dengan akhir tahun 2026 realisasi dari target masing-masing program tersebut masih belum tercapai/kurang, maka rumusan program dan kegiatan ditahun 2027 akan lebih difokuskan dalam rangka pencapaian target program tersebut ditahun mendatang. Penyusunan program dan kegiatan juga megacu kepada program dan kegiatan prioritas yang telah termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			88.50	Nilai			88.75	Nilai
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan		100	%	11,375,868,151		100	%
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (%)	Kab. Balangan	2	Dokumen	37,660,100		2	Dokumen
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Balangan	5	Laporan	21,471,300		5	Laporan
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	2	Dokumen	16,690,000		2	Dokumen
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu (%)		100	%	8,086,042,026		100	%
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kab. Balangan	546	Orang/Bulan	7,964,842,026		546	Orang/Bulan
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Kab. Balangan	12	Dokumen	121,200,000		12	Dokumen

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Keuangan SKPD (Dokumen)				Dana Bagi Hasil			
3.31.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)		100	230,860,000			100	281,691,096
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab. Balangan	2	180,860,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	181,511,096
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kab. Balangan	10	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10	100,180,000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)		100	568,619,650			100	741,306,842
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	1	17,635,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	17,698,787
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	30	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14	180,648,000
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1	59,319,250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	59,532,799
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	2	56,695,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	56,899,202
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Kab. Balangan	3	4,970,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	4,987,892

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Balangan	1	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	421,540,162
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)		100	60,000,000			100	60,216,000
3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Kab. Balangan	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	35,000,000
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Kab. Balangan	2	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	25,216,000
3.31.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP (%)		100	2,059,303,146			100	2,066,716,637
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Kab. Balangan	1	143,418,954	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	143,935,262
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Kab. Balangan	1	1,915,884,192	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	1,922,781,375
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (%)		100	295,221,929			100	268,284,727
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Kab. Balangan	60	227,373,804	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		60	200,192,349
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kab. Balangan	105	33,848,125	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		110	33,969,978
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang	Kab. Balangan	1	34,000,000	Dana Transfer Umum -		1	34,122,400

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			dipelihara/ direhabilitasi (Unit)				Dana Bagi Hasil			
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)		29.34 %	48.000,000			31.90 %	43.591,008
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)		100 %				100 %	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)		12 Buah	25.000,000			13 Buah	22.288,323
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	25.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	22.288,323
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)		12 Buah	23.000,000			13 Buah	21.302,685
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Balangan	12 Dokumen	23.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		13 Dokumen	21.302,685

Kode Rekening	Unsuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)		0				0	
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	Kab. Balangan	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	
3.30.03	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)		32.05	3,840,329,700			37.05	3,919,187,437
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)		100	3,711,529,700			100	3,789,923,757
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Kab. Balangan	11	3,303,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		11	3,380,124,071
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Kab. Balangan	11	408,329,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		11	409,799,686
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)		79.31	128,800,000			84.31	129,263,680
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Kab. Balangan	1	102,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	103,320,620
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Kab. Balangan	1	25,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	25,943,060
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		6.80	1,072,716,418			6.60	1,094,743,691

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)		75	1,072,716,418			77	1,094,743,691
		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)		65				67	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Kab. Balangan	12	161,227,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	179,973,112
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Balangan	1	911,489,218	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	914,770,579
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR		14.29	310,359,600			28.57	211,476,894
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor (%)		40.00	310,359,600			43.00	211,476,894
		Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)		5				7	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Kab. Balangan	5	150,649,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5	151,192,139
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		1	159,709,800	Dana Transfer Umum -		1	60,284,755

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)		70.00	1,034,277,699	Dana Bagi Hasil		71.00	1,055,515,667
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)		25.00				26.00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang berlaku (%)		30.00	1,034,277,699			32.00	1,055,515,667
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)		130				140	Buah
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya ditera ulang (Unit)	Kab. Balangan	1,300	612,521,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1,320	614,726,978
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibanding metrologi legal yang dibina (Orang)	Kab. Balangan	225	421,755,799	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		225	440,788,689
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)		4.88	1,701,505,700			9.99	1,736,444,599
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)		1,762,000,000	1,701,505,700			1,938,000,000	1,736,444,599
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	Kab. Balangan	30	1,701,505,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		34	1,736,444,599
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)		14.55	1,312,802,000			15.23	1,339,759,216

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.02.2.01	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)		5 IKM	1,312,802,000			5 IKM	1,339,759,216
		Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)		375 IKM				400 IKM	
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)		38.13 %				39.57 %	
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	82,680,376
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	295,995,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	304,470,958
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	941,807,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	952,607,882
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)		17.00 %	178,181,000			19.00 %	181,839,788
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)		160 IKM	178,181,000			200 IKM	181,839,788
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Usaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi	Kab. Balangan	1 Dokumen	75,780,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	79,070,145

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	102.401,000		1 Dokumen	102.769,643
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE PRODUK IKM YANG DI PROMOSIKAN (%)		66.67 %	1,166,350,100		66.67 %	1,190,300,057
3.31.04.2.01	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produk IKM yang dikurasi (Produk)		18 Produk	1,166,350,100		21 Produk	1,190,300,057
		Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)		166 IKM			176 IKM	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.
3. Prioritas pengembangan sektor perindustrian dan sektor perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

1.2 Analisa Sosial Ekonomi

Setelah dirumuskan pertimbangan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, penetapan 9 program prioritas dan 1 program penunjang yang dijabarkan kedalam 21 kegiatan dan 41 Sub kegiatan pada rencana kerja tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, tentunya perlu dilakukan analisa sosial ekonomi.

Analisa dilakukan pada 2 (Dua) urusan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
 - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Melalui sosialisasi tata cara pengajuan permohonan surat rekomendasi dan atau fasilitasi permohonan perizinan elektronik

terintegrasi berbasis resiko (OSS-RBA) untuk membantu masyarakat/pelaku usaha dalam mendapatkan surat keterangan izin usaha dan atau surat rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kegiatan pendataan waralaba informasi pelaku usaha kemitraan waralaba yang ada di Kabupaten Balangan dikumpulkan sebagai bahan awal bagi Dinas/Bidang/Instansi terkait untuk meningkatkan kegiatan usaha waralaba, melaksanakan pembinaan serta monitoring keberlangsungan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Balangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Bertujuan untuk menunjang peningkatan sarana distribusi perdagangan (pasar) melalui beberapa kegiatan yaitu, pembangunan sarana distribusi perdagangan, revitalisasi atau perbaikan sarana distribusi perdagangan, pemeliharaan sarana distribusi perdagangan, pemberdayaan dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan serta penataan pedagang. Adapun dampak dan manfaat dari program, diantaranya:

Dengan melakukan pembangunan pasar atau revitalisasi pasar, akan dapat memperbanyak lapak/tempat pedagang yang dapat berjualan pada pasar tersebut. Melalui pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu pemeliharaan, pembersihan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan, fasilitas sarana perdagangan yang telah ada dapat terpelihara dan tidak kumuh, nyaman saat berbelanja/bertransaksi serta kemudahan akses hingga tertatanya pedagang membuat pasar akan terlihat rapi. Pasar adalah salah satu titik penting dalam perekonomian sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan tempat perputaran uang.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan yang dilakukan untuk menstabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga/inflasi di daerah dengan langkah nyata berupa pelaksanaan

kegiatan pasar murah dalam upaya membantu menjaga nilai daya beli masyarakat

d. Program Pengembangan Ekspor

Memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan pemasaran produknya ke pasar yang lebih luas melalui pameran dagang yang dapat diikuti dan pelatihan ekspor. Program ini bertujuan menghimpun produk lokal dan unggulan daerah untuk dapat mempromosikan produknya. Diharapkan dapat membantu produk lokal dan unggulan daerah dalam mempromosikan dan memasarkan dengan difasilitasi untuk mengikuti pameran dagang dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan atau omset peserta pameran dagang serta menumbuhkan ekonomi kreatif.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Memfasilitasi produk lokal dan unggulan daerah agar dapat masuk retail-retail modern guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan mengembangkan pemasaran produk lokal dan unggulan daerah yang dituangkan kedalam hubungan kerjasama (Mou) dengan retail modern.

f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Guna memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan terjaminnya kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan serta memastikan kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan dengan perlindungan hukum dan keadilan transaksi agar dapat meningkatkan saling kepercayaan dalam transaksi jual beli di masyarakat.

2. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui pelatihan IKM. Melalui pelatihan IKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan ketrampilan dalam proses produksi maupun peningkatan manajerial, IKM diajarkan untuk meningkatkan produktifitas produksi sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pelatihan tidak hanya diajarkan tentang operasional dan teknis namun IKM juga diberikan pengertian

tentang teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk efisiensi kerja.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- Pengendalian Izin Usaha Industri melalui sertifikasi halal gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan fasilitasi sistem jaminan halal (SJH) kepada IKM untuk didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk olahannya. Karena dengan sudah memiliki sertifikasi halal produk memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produk. Berikut beberapa manfaat dari sertifikasi halal bagi produsen. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, karena dengan adanya label halal produk, maka konsumen tidak merasa khawatir dengan kandungan pada produk. Kedua, dapat meningkatkan luas jangkauan pemasaran, kepercayaan konsumen yang baik dapat meningkatkan jangkauan pasar dari produk olahan. Produk akan semakin dikenal dan menjadi pilihan oleh masyarakat luas. Dengan hal ini, produk memiliki peluang untuk memperluas jaringan pemasaran hingga ke daerah lain
- Pengendalian Izin Usaha Industri melalui pendaftaran merek gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan pendaftaran merek gratis kepada IKM. Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau Startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Merek berfungsi untuk menjamin asal barang atau jasa. Sehingga, fungsi tersebut berkontribusi pada transparansi pasar yang menguntungkan konsumen dan pelaku usaha. Suatu usaha harus dilindungi terhadap pesaing tidak sehat yang

menginginkan barang atau jasanya menyamar sebagai barang atau jasa usaha orang lain.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dijaman era digitalisasi seperti sekarang banyak kebijakan pemerintah yang mengarah pada sistem pelayanan, perijinan dan pendataan secara online. Banyak para pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang belum bisa melakukan secara mandiri, untuk menyikapi hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memberikan fasilitasi kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memperoleh perijinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), memfasilitasi pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan Industri (SIMANIS) serta memfasilitasi pendaftaran dan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan juga melakukan pendataan bagi para Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada diseluruh Kabupaten Balangan guna mempermudah untuk melakukan pembinaan dan mengukur tingkat produktivitas para IKM. Selain itu juga melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha agar mendapatkan pemahaman lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bersama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) Kabupaten Balangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berusaha mewujudkan Industri Kerajinan Balangan yang mandiri dan berdaya saing berbasis sumber daya unggulan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah dengan cara mempromosikan hasil-hasil kerajinan IKM Balangan melalui partisipasi pameran-pameran baik skala kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kreativitas para pengrajin sehingga mereka mampu berinovasi dan terus meningkatkan kualitas hasil kerajinan mereka.

1.3 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2026 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029. Tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak total 10 program, 21 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Program prioritas dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 22.040.390.368,-

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan		88.50	11,375,868,151			88.75	11,609,461,434	
3.31.01.2.01		Persentase dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (%)		100	75,821,400			100	76,094,355	
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Balangan	2	37,660,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	Dokumen	37,795,675
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Balangan	5	21,471,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5	Laporan	21,548,596
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	2	16,690,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	Dokumen	16,750,084
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu (%)		100	8,086,042,026			100	%	8,115,151,777
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kab. Balangan	546	7,964,842,026	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		546	Orang/Bulan	7,993,515,457
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Kab. Balangan	12	121,200,000	Dana Transfer Umum -		12	Dokumen	121,636,320

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		keuangan SKPD (Dokumen)				Dana Bagi Hasil			
3.31.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)		100	230,860,000			100	281,691,096
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab. Balangan	2	180,860,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	181,511,096
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kab. Balangan	10	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10	100,180,000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)		100	568,619,650			100	741,306,842
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	1	17,635,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	17,658,787
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	30	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14	180,648,000
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1	59,319,250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	59,532,799
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	Kab. Balangan	2	56,695,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	56,899,202
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Kab. Balangan	3	4,970,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	4,987,892

Kode Rekening	Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Balangan	1	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	421,540,162
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)		100	60,000,000			100	60,216,000
3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Kab. Balangan	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	35,000,000
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Kab. Balangan	2	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	25,216,000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP (%)		100	2,059,303,146			100	2,066,716,637
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Kab. Balangan	1	143,418,954	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	143,935,262
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Kab. Balangan	1	1,915,884,192	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	1,922,781,375
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (%)		100	295,221,929			100	268,284,727
3.31.01.2.09.0001	Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya perorangan dan pajak kendaraan yang dipelihara dan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Kab. Balangan	60	227,373,804	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		60	200,192,349
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kab. Balangan	105	33,848,125	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		110	33,969,978
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang	Kab. Balangan	1	34,000,000	Dana Transfer Umum -		1	34,122,400

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dipelihara/ direhabilitasi (Unit)				Dana Bagi Hasil			
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)		29.34 %	48,000,000			31.90 %	43,591,008
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)		100 %				100 %	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)		12 Buah	25,000,000			13 Buah	22,288,323
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	22,288,323
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)		12 Buah	23,000,000			13 Buah	21,302,685
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Balangan	12 Dokumen	23,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		13 Dokumen	21,302,685

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)		0	Buah	-		0	Buah
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	Kab. Balangan	0	Dokumen	-		0	Dokumen
3.30.03	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)		32.05	%	3,840,329,700		37.05	%
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)		100	%	3,711,529,700		100	%
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Kab. Balangan	11	Unit	3,303,200,000		11	Unit
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Kab. Balangan	11	Unit	408,329,700		11	Unit
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)		79.31	%	128,800,000		84.31	%
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Kab. Balangan	1	Dokumen	102,950,000		1	Dokumen
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Kab. Balangan	1	Dokumen	25,850,000		1	Dokumen
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)		6.80	%	1,072,716,418		6.60	%
									1,094,743,691

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)		75	Kali	1,072,716,418		77	Kali	1,094,743,691
		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)		65	Kali			67	Kali	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Kab. Balangan	12	Laporan	161,227,200		12	Laporan	179,973,112
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Balangan	1	Laporan	911,489,218		1	Laporan	914,770,579
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN (%)		14.29	%	310,359,600		28.57	%	211,476,894
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor (%)		40.00	%	310,359,600		43.00	%	211,476,894
		Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)		5	Orang			7	Orang	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Kab. Balangan	5	Pelaku Usaha	150,649,800		5	Pelaku Usaha	151,192,139
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promos		1	Produk	159,709,800		1	Produk	60,284,755

Kode Rekening	Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)		70.00	1,034,277,699	Dana Bagi Hasil		71.00	1,055,515,667
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)		25.00				26.00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTTP) bertanda Tera Sah yang berlaku (%)		30.00	1,034,277,699			32.00	1,055,515,667
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTTP) yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)		130		Buah		140	Buah
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya (Unit)	Kab. Balangan	1,300	612,521,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1,320	Unit
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dilbina (Orang)	Kab. Balangan	225	421,755,799	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		225	Orang
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)		4.88	1,701,505,700			9.99	1,736,444,599
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)		1,762,000,000	1,701,505,700	Rupiah		1,938,000,000	1,736,444,599
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	Kab. Balangan	30	1,701,505,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		34	UMKM
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKIM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)		14.55	1,312,802,000			15.23	1,339,759,216

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.02.2.01	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)		5 IKM	1,312,802,000			5 IKM	1,339,759,216
		Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)		375 IKM				400 IKM	
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)		38.13 %				39.57 %	
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	Kab. Balangan	1	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	82,680,376
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	Kab. Balangan	1	295,995,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	304,470,958
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Kab. Balangan	1	941,807,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	952,607,882
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)		17.00 %	178,181,000			19.00 %	181,839,788
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUII), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINaas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)		160 IKM	178,181,000			200 IKM	181,839,788
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi	Kab. Balangan	1	75,780,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	79,070,145

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.03.2.01.0004	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	Kab. Balangan	1 Dokumen	102.401.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	102.769.643
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE PRODUK IKM YANG DI PROMOSIKAN (%)		66.67 %	1,166,350,100			66.67 %	1,190,300,057
3.31.04.2.01	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produk IKM yang dikurasi (Produk)		18 Produk	1,166,350,100			21 Produk	1,190,300,057
		Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)		166 IKM				176 IKM	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja tahun 2026 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Selain **input** yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. **Input** dan **proses** akan memberikan **benefit** dan **impact** kepada **output** maupun **outcome**, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggungjawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang berupaya untuk menunjang visi misi Bupati/Wakil Bupati Balangan tahun 2025-2029 yaitu “**BALANGAN BAHARAT (Membangun Desa, Menata Kota Menuju Masyarakat yang Harmonis, Religius, Maju dan Sejahtera)**”.

Kesadaran untuk secara terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penganjuran penerapan *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Paringin, Juli 2025
Plt. Kepala Dinas,

HERLINA S. Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19701205 199603 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 050.24/007 /SK/DISPERINDAG-BLG/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2026**

KEPALA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2026, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2026;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;

- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 9 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas,


HERLINA S.Sos, MM
Pembina Utama (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERIDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN
NOMOR : 050.24/ /SK/DISPERINDAG-BLG/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Hj. HERLINA, S. Sos, MM NIP. 19701205 199603 2 003	Plt. Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	SAHRIL, S.Kom NIP. 19851127201001 1 014	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3	SYAHRIDHA ELYANI, S.Pi, M.P NIP. 19810123 200501 2 015	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Sekretaris
4	SAMSUL BAKHRI, S.Pd.I, MM NIP. 19831125 200801 1 006	Plt. Kepala Bidang Kemetrologian dan Stabilisasi Harga	Anggota
5	Hj. IDA ROSIYANTI, SE NIP. 19780620 200604 2 021	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
6	SAMSUL BAKHRI, S.Pd.I, MM NIP. 19831125 200801 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	EKA MAYA JURADA, SE NIP. 19751230 200604 2 020	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
8	MAYDHILA SAPUTRI, S.Si NIP. 19840516 2009 2 009	Jf Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	Anggota
9	ASBIT, SE NIP. 19810817 201503 1 001	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
10	ARIEFANSYAH, A.Md NIP. 19811031 200604 1 015	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
11	SUNTARI SRI REJEKI, ST,MT NIP. 19821019 200604 2 007	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
12	ALFIAN NOOR, S.Sos NIP. 19781219 201001 1 012	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
13	NURLIANA, AMK NIP. 19860224 200904 2 002	Kepala UPTD Pasar	Anggota

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 9 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas,



HERLINA, S.Sos, MM
Pembina Utama (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003